USAID | INDONESIA
FROM THE AMERICAN PEOPLE

PERTUMBUHAN EKONOMI DIPERKUAT DAN LAPANGAN KERJA DICIPTAKAN

Photo: W.S. Foerderer

TANTANGAN

Pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) sebesar 5.13% pada tahun 2004 dan proyeksi 5.4% pada tahun 2005, belum mampu menyerap membanjirnya lebih dari dua juta pencari kerja setiap tahun dan belum dapat meningkatkan penghasilan rumah tangga.

Bank Dunia memperkirakan diperlukan waktu 151 hari untuk mendaftarkan sebuah usaha baru dan lebih dari 7 tahun untuk menjalankan proses kepailitan.

Korupsi sudah merajalela dan menghambat investasi. Indonesia menduduki peringkat ke 133 dari 146 negara pada indeks persepsi korupsi yang dilakukan oleh lembaga Transparansi Internasional (TI).

Tujuan

Peningkatan pertumbuhan lapangan kerja dan kemakmuran.

Memperbaiki investasi, iklim usaha, dan keterbukaan.

Peningkatan ekspor dan penanaman modal asing.

Memperbaiki sektor keuangan yang aman dan sehat.

TINJAUAN

Pemerintah Amerika Serikat menyediakan dana bantuan sebesar $87 juta untuk jangka waktu lima tahun (2004-2008) guna membantu Indonesia dalam masa transisi perekonomiannya. Bantuan yang diberikan pada pemerintah Indonesia dan sektor swasta akan ditekankan pada penciptaan lapangan kerja dan iklim usaha serta meningkatkan investasi, pemberantasan korupsi, peningkatan daya saing pada sektor utama, dan penyempurnaan sistem keuangan yang aman dan sehat. Melalui USAID, Amerika Serikat bekerjasama dengan pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk memastikan agar generasi yang akan datang dapat menikmati negara yang lebih makmur, demokratis dan stabil.

PROGRAM-PROGRAM

Keberhasilan ekonomi Indonesia di masa mendatang terletak pada peningkatan produktifitas, penghasilan dan kemakmuran penduduknya. Tujuan inilah yang mendasari program USAID. Bantuan diarahkan untuk mengembangkan sistem keuangan yang aman dan sehat, dengan cara memperkuat lembaga-lembaga utama dan memperbaiki iklim usaha dan penanaman modal dengan mempromosikan perkembangan sektor swasta. Semua inisiatif secara langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan transparansi (keterbukaan) sehingga dapat memberantas korupsi, dan kejahatan di bidang keuangan.

IKLIM USAHA & PENGEMBANGAN SEKTOR SWASTA

Upaya untuk meningkatkan keterbukaan dan kepastian hukum serta pengaturan iklim usaha, bertujuan untuk mengurangi biaya siluman dan ketidakpastian kegiatan usaha; serta meningkatkan perdagangan, investasi, dan penciptaan lapangan kerja. Salah satu wujud program USAID dalam upaya menuju ke arah ini adalah bekerjasama dengan pemerintah Indonesia untuk memperkuat Pengadilan Niaga dan Pengadilan Anti Korupsi agar dapat memperbaiki iklim investasi dan usaha serta memberantas tindak korupsi. USAID juga menjalin kerja sama dengan Pusat-pusat Pelayanan Bisnis Satu Atap yang tersebar di berbagai kota dan kabupaten guna memangkas prosedur dan mengurangi biaya dalam kegiatan usaha. USAID juga memberikan bantuan teknis pada sektor industri utama untuk memacu pertumbuhan, ekspor, lapangan kerja dan kemakmuran rakyat. Hal ini akan mendorong peningkatan produktifitas dan daya saing nasional dengan memperkuat koalisi publik, swasta dan masyarakat madani guna mendukung perubahan hukum, perbaikan pengaturan dan perubahan kebijakan agar lebih ramah terhadap iklim usaha.

SEKTOR KEUANGAN YANG AMAN DAN SEHAT

Pada sektor ini, USAID berupaya memperbaiki pengawasan lembaga bank dan bukan bank guna menciptakan sistem keuangan yang aman dan sehat dengan cara lebih memperbaiki transparansi dan tata kelola.

Lanjutan >

USAID | INDONESIA
FROM THE AMERICAN PEOPLE

PERTUMBUHAN EKONOMI DIPERKUAT DAN LAPANGAN KERJA DICIPTAKAN

BANTUAN USAID PADA INDONESIA

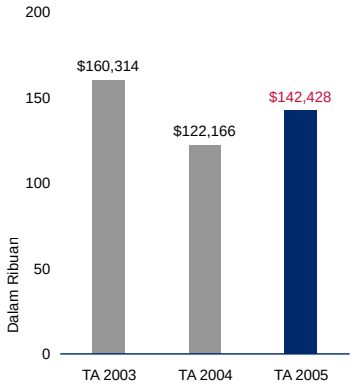

Pendanaan: Kelangsungan Hidup Anak dan Kesehatan, Bantuan Pembangunan, Dukungan Ekonomi, PL 480 Title II (Termasuk Bantuan Pangan Darurat dan Non Darurat

TA 2005 Anggaran untuk Pertumbuhan Ekonomi Persentase Untuk Tiap Bidang Program

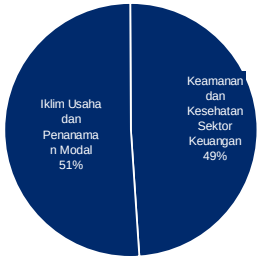

Jumlah Tahun Anggaran 2005 Untuk Pertumbuhan Ekonomi: $19,480,000

INFORMASI

Betina Moreira
Outreach & Communications
USAID/Indonesia
Tel: 3435-9424
Email: bmoreira@usaid.gov

www.usaid.gov/id

Sebuah program pelatihan sektor keuangan telah diluncurkan dengan AIG (American International Group) guna membangun keahlian calon pemimpin keuangan di masa depan. USAID juga memberikan bantuan teknis pada PPATK, Departemen Keuangan, dan lembaga/badan pemerintah lain yang terlibat dalam pemantauan dan pencegahan kejahatan di bidang keuangan. Bantuan teknis lainnya adalah kerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam membantu membangun Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) untuk membangkitkan kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan yang masih rapuh.

BEBERAPA POKOK KEBERHASILAN PROGRAM

USAID turut serta memberikan masukan pada pemerintah Indonesia dalam penyusunan Undang-undang Penjaminan Simpanan dan juga ikut membantu terbentuknya lembaga penjaminan simpanan agar dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para penabung dan sistem perbankan.

Delapan pusat bantuan hukum yang independen telah didirikan dengan bantuan USAID, dengan sasaran para pegawai pemerintah daerah, anggota DPRD dan LSM. Pusat bantuan hukum ini menawarkan pelatihan dalam pembuatan kebijakan dan rancangan legislasi serta konsultasi untuk proyek-proyek legislatif tertentu.

USAID telah meluncurkan program “Success Alliance” untuk meningkatkan dan memperbaiki mutu cocoa/coklat Indonesia. Success Alliance merupakan kemitraan publik/swasta dengan Masterfoods (dulu Mars Candies), Yayasan Coklat Dunia (The World Cocoa Foundation) dan ACDI/VOCA. Dalam aliansi ini lebih dari 60.000 petani telah dilatih dan beberapa industri telah menanam modal beberapa juta dolar lagi dalam bidang penelitian dan pemasaran, dan sudah bertekad untuk membeli coklat di Indonesia senilai lebih dari $150 juta.

USAID juga membantu Pemerintah dalam mendirikan BPPN yang telah behasil mengawasi proses kepailitan dan likuidasi bank pemerintah maupun swasta. Setelah menyelesaikan mandatnya, BPPN dibubarkan seperti halnya RTC (Resolution Trust Company) di Amerika Serikat.

USAID membantu pembuatan rancangan UU Anti Pencucian Uang serta peraturan pelaksanaannya, dan Peraturan Pemerintah mengenai Perlindungan Saksi, yang semuanya itu sangat penting untuk memerangi korupsi dan kejahatan keuangan.

Sebagai hasil dari komitmen pemerintah Indonesia dan bantuan teknis USAID, Indonesia telah dikeluarkan dari “daftar hitam” internasional NCCT Non-Cooperating Countries and Territories) pada tanggal 11 Pebruari 2005.